

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. 2001. *Etika Profesi Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Adrian Sutedi. 2006. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Arie S. Hutagalung. 2005. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia. Jakarta.
- B. Ter Haar Bzn. 1987. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Bachtiar Effendie. 1980. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*. Alumni. Bandung.
- Budi Harsono. 2003. *Hukum Agraria*. Djambatan. Jakarta.
- Boedi Harsono. 1971. *Undang-Undang Pokok Agraria, Bagian Kedua*. Djambatan. Jakarta.
- Departemen Dalam Negeri Direktorat Agraria. 1982 *Buku Petunjuk Bagi PPAT*. Yayasan Husada Bina Sejahtera. Jakarta.
- Eddy Rukhiyat. 1999. *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*. Alumni. Bandung
- Eddy Rukhiyat. 1994. *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*. Alumni. Bandung
- Effendi Perangin. 1994 & 1986. *Hukum Agraria di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Effendi. 1987. *Praktik Permohonan Hak Atas Tanah*. Rajawali Press. Jakarta.
- Hans Kelsen. 2009. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Nusamedia. Jakarta:
- Herlien Budiono. 2017. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. PT. Citra Aditya Bakti, . Bandung.

- Irawan Soerodjo. 2002. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Arkola. Jakarta
- J. Andy Hartanto. 2015. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah*. Laksbang Justitia. Surabaya.
- Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI. 2006.
- Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim. *Sendi-Sendi Hukum Agraria*. Jakarta Ghalia Indonesia. 1993.
- Koentjaraningrat. 1993. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia. Jakarta.
- Imam Sudiyat. 1981. *Hak Adat Sketsa Azas*. Liberty. Yogyakarta.
- K. Wantijk Saleh. 1982. *Hak Anda Atas Tanah*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Lawrence, M. Freadman. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* Terjemahan. M. Khozim. Bandung: Nusa Media. 2013.
- M. Solly Lubis. 1994. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Mandar Maju. Bandung.
- Mariot P. Siahaan. 2005. *Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Teori dan Praktek)*. Rajawali Press. Jakarta.
- Nasution Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.
- R Subekti. 1988. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Romli Atmasasmita. 2005. *Strategi Pembangunan Nasional*. Lembang. Bandung.
- Rusmadi Murad. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Alumni. Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1983 & 1986. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta. Bandung.

- Soedikno Mertokusumo. 2008. *Hukum dan Politik Agraria*. Karunika Universitas Terbuka. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 1988. *Hukum dan Politik Agraria*. Karunika-Universitas Terbuka. Jakarta:
- Universitas Jambi. 2022. *Pedoman Penulisan Tesis*. Program Kenotariatan. Jambi.
- Urip Santoso. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Urip Santoso. 2014. *Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Prenamedia Group. Jakarta.
- Urip Santoso. 2015. *Perolehan Tanah Oleh Pemerintah Daerah*. Prenada Media. Jakarta.
- Wantjik Saleh. 1982. *Hak Anda Atas Tanah*. Ghalia. Jakarta.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

JURNAL / ARTIKEL ILMIAH

- Arizon, Yance. “Kepastian Hukum” (2018). yancearizona.net
- Endriana, M. S., & Handoko, W. *Balik Nama Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Jual Beli Tanah Di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Batang*. Tesis. Universitas Diponegoro. 2022.
- Hayati, Nur. “Peralihan Hak Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah.” *Lex Jurnalica* 13(3), 2016.
- Kurnia, Ida, Yetniwati, and Suhermi. “Perjanjian Salang Pinjam Tanah...” *Jurnal*, 4(2021): 3536–3559.

- Lalu, M. Alwin Ahadi. “Efektifitas Hukum Dalam Prespektif Filsafat Hukum.” *Jurnal USM Law Review* 5(1), 2015.
- Muchsin. “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor...” Surakarta: Pascasarjana UNS, 2003.
- Mudjiono. “Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia Melalui Revitalisasi Fungsi Badan Peradilan”. *Jurnal Hukum*. 2007.
- Rahayu. “Pengangkutan Orang.” etd.eprints.ums.ac.id
- Rico Pratama Purnomo. *Analisis terhadap Kekuatan Hukum Para Pihak...* Pekanbaru, 2016.
- Rifiana, Agustin, Yetniwati, and Diana Amir. “Kewajiban Notaris Dalam Pembuatan Akta...” *Wajah Hukum* 6(2), 2022.
- Setiono. *Rule of Law*. Disertasi S2, FH UNS, 2004.
- Srihandayani, Luisa, and Siti Malikhatun Badriyah. “Perlindungan Hukum Pembeli...” *Notarius* 16(1), 2023: 439–455.
- Sulastri. 2020. *Penyuluhan Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria Dalam Undang-undang Pokok Agraria No.50 Tahun 1960 Di Kelurahan Baros*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran. Jakarta.
- Yetniwati, Taufik Yahya, and Diana Amir. “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol.” *Undang: Jurnal Hukum* 4(1), 2021: 213–244.
- Zaki Ulya, 2015, “Eksistensi Badan Pertanahan Aceh Sebagai Peramgkat Daerah di Aceh Dalam Aspek Kepastian Hukum Bidang Pertanahan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 12 Nomor 3.
- Zainuddin Zaki Ulya, 2018, “Domein Verklaring Dalam Pendayagunaan Tanah di Aceh”, *Jurnal Hukum Suara Keadilan*, Volume 13, Nomor 1, hlm. 40.

Peraturan Perundang-Undangan

Departemen Dalam Negeri Direktorat Agraria, 1982, Buku Petunjuk Bagi PPAT, Jakarta, Yayasan Husada Bina Sejahtera, Hal. 68.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Pasal 1 angka 1 dan angka 6 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696)

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 8 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. (“UU Pelaksanaan Pendaftaran Tanah”).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen ATR/KPBN) No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021.

Peraturan menteri Agraria dan Tataruang Kepala badan Pertanahan nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kementerian agrarian dan Tataruang badan Pertanahan nasional.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang

Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris